

LAMPUNG BARAT



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
JULI TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuaian – penyesuaian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program kegiatan serta subkegiatan pelayanan Perangkat Daerah satu tahun kedepan. Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama Perangkat Daerah lainnya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022 kedalam 5 (Lima) Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Melalui Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini diharapkan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai.

Liwa , Juli 2022
Plh. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.
Nip. 19650916 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 12

BAB IV PENUTUP 14

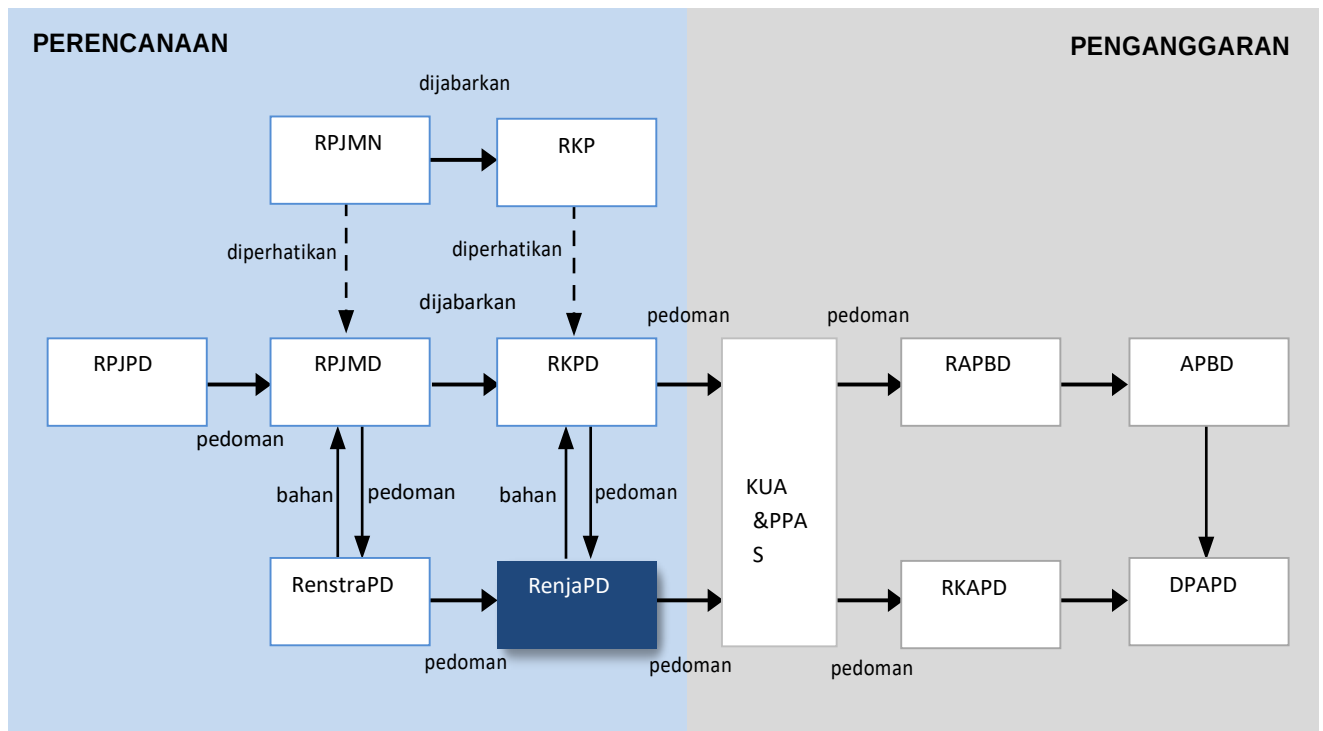
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerjase bagi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ininantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Adanya kondisi luar biasa yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat **Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilandasi oleh beberapa aturan hukum yang mengatur keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2022;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat secara berkesinambungan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut.

1. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Renj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022, meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

4. BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

5. LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan triwulan II.
 - Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- Masalah – masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan indicator Jumlah Investasi PMDN/PMA Rp. 4.042.244.384,-
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu B

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022

dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 10 (Sepuluh) kegiatan serta 31 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja sebesar Rp. 4.532.443.500,- setelah pergeseran Rp. 4.291.607.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.313.113.045,- atau 32,7 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 17 subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen pada triwulan II yaitu :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 2 Dokumen dari target 4 Dokumen (50%) persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD realisasi fisik / output sebesar 1 Dokumen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
4. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas (Laporan disusun diakhir tahun);
6. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
7. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
8. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas

9. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi fisik / output sebesar 915 Surat (89%) Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
10. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
11. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi fisik / output output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
12. Subkegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas;
13. Subkegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 20 Survei Perizinan (28,57 persen) dari target 70 Survei Perizinan Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan anggaran kas.
14. Subkegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu, perizinan dan nonperizinan realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen.
15. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena adanya perubahan petunjuk teknis tentang pelaksanaan DAK NON FISIK
16. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena adanya perubahan petunjuk teknis tentang pelaksanaan DAK NON FISIK
17. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan OPD yang menangannya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Pergeseran / Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022.

Adapun rincian Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2022 sebesar Rp. 4.532.443.500,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp. 4.291.607.500,-
3. Jumlah anggaran yang bertambah akibat akibat refocusing tahun 2022 sebesar Rp. –
4. Jumlah anggaran yang berkurang akibat pergeseran tahun 2022 sebesar Rp. 240.836.000,-
5. Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat pergeseran tahun 2022 sebanyak : 0 Sub Kegiatan (Perubahan target indicator dari jumlah 2 event menjadi 1 event)
6. Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing tahun 2022 sebanyak 0 subkegiatan

7. Jumlah subkegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 0 subkegiatan
8. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 0 kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2017–2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Demikian perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Liwa , Juli 2022
Plh. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.
Pembina Utama Muda
Nip. 19650916 199402 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
Kabupaten Lampung Barat

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2018 ditambah Tahun 2019 ditambah Tahun 2020 ditambah Tahun 2021	Target Kinerja DPA Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	100,00%	2	100%
2 18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	110 Dokumen	88 Dokumen	22 Dokumen	10 Dokumen	45,45%	98	89%
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	20 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%	18	90%
2 18 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5	100%
2 18 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0	0%
2 18 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	5 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0,00%	4	80%
2 18 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0	0%
2 18 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%	18	90%
2 18 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	50 Dokumen	40 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00%	45	90%
2 18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	14	93%
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	28 Orang	26 Orang	26 Orang	24 Orang	92,31%	24	86%
2 18 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	4	80%
2 18 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5	100%
2 18 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	5	100%
2 18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	100,00%	4	100%

2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	100,00%	10	100%
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	4	Jenis	50,00%	8	100%
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum)	5	SKHU	5	SKHU	5	SKHU	5	SKHU	100,00%	5	100%
2	18	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	60	Kali	48	Kali	12	Kali	6	Kali	50,00%	54	90%
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	120	Kali	84	Kali	12	Kali	6	Kali	50,00%	90	75%
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	16	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	4	25%
2	18	1	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	16	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	4	25%
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Sub Organisasi	4	Sub Bagian	4	Sub Bagian	4	Sub Bagian	100,00%	4	100%
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5.635	Surat	6.761	Surat	1027	Surat	915	Surat	89,09%	7.676	136%
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	5	Rekening	4	Rekening	4	Rekening	4	Rekening	100,00%	4	80%
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	4	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	100,00%	4	100%
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100,00%	3	100%
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya	15	Kendaraan	11	Kendaraan	11	Kendaraan	5	Kendaraan	45,45%	11	73%
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	Unit	9	Unit	9	Unit	6	Unit	66,67%	9	90%
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Gedung	2	Gedung	2	Gedung	2	Gedung	100,00%	2	100%
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah unit usaha baru	50	Unit Usaha Baru	22	Unit Usaha Baru	50	Unit Usaha Baru	212	Unit Usaha Baru	424,00%	234	468%

[illegible]

2	18	5	2.01	2	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Penanaman Modal	360	Orang	234	Orang	210	Orang	0	Orang	0,00%	444	123%
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	40	Laporan	33	Laporan	16	Laporan	13	Laporan	81,25%	46	115%
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanaman Modal di Kab. Lampung Barat	15	Sektor Usaha	15	Sektor Usaha	15	Sektor Usaha	5	Sektor Usaha	33,33%	20	133%
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	5	Buku	4	Buku	1	Buku	0	Buku	0,00%	4	80%
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	48	Eksemplar	45	Eksemplar	45	Eksemplar	0	Eksemplar	0,00%	45	94%
															69,10%		97%

LAMPIRAN II
Perubahan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020						Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Detail Perubahan Dibanding APBD Murni						
		Indikator	Target 2022			Indikator	Target Renja Perubahan	Pagu Indikatif Tahun 2022				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif													
			Renja Murni	APBD Murni	Renja Perubahan			Renja Murni	APBD Murni	APBD Pergeseran	Renja Perubahan	Renja Murni	Renja Perubahan		Nasional	Daerah	Renja Murni	Renja Perubahan													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																							5.888.521.800	DPMP/TSP		
2	18	001			Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan		5.660.700.804	4.532.443.500	4.291.607.500	4.291.607.500													5.888.521.800	DPMP/TSP		
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	3.217.629.304	2.934.694.900	2.934.694.900	2.934.694.900	-												3.055.774.800	DPMP/TSP		
2	18	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 5 Dokumen 10 Laporan	22.666.700	23.532.400	23.532.400	23.532.400													11 Dokumen 5 Dokumen 12 Laporan	25.690.400	DPMP/TSP	
2	18	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.529.100	3.268.000	3.268.000	3.268.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	11 Dokumen	4.346.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.711.000	1.848.100	1.848.100	1.848.100	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	1.848.100	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.711.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	1.811.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.600.300	1.627.300	1.627.300	1.627.300	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	1.627.300	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan- SKPD	1 Dokumen	1.561.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	1.581.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	2.161.000	1.969.600	1.969.600	1.969.600	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU					Aparatur	Aparatur	1 Laporan	1.969.600	DPMP/TSP				
2	18	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	10 Laporan	11.393.300	11.427.400	11.427.400	11.427.400	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU					Aparatur	Aparatur	12 Laporan	12.507.400	DPMP/TSP				
2	18	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25 Orang/Bulan 1 Laporan 1 Laporan	2.752.449.504	2.511.311.000	2.511.311.000	2.511.311.000		DAU						Aparatur	Aparatur	24 Orang/Bulan 1 Laporan 17 Laporan	2.514.125.500	DPMP/TSP				
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2.746.374.504	2.505.810.500	2.505.810.500	2.505.810.500	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	24 Orang/Bulan	2.505.810.500	DPMP/TSP				
2	18	001	2.02	003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Laporan	2.500.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.02	004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.575.000	1.000.500	1.000.500	1.000.500	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	17 Laporan	3.815.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.02	005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	2.000.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD				Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen					Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	8.921.000	DPMP/TSP				
2	18	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD				Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen					Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU				Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	8.921.000	DPMP/TSP				

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Detail Perubahan Dibanding APBD Murni
														Pagu Indikatif Tahun 2022				Lokasi		Prioritas						Target	Pagu Indikatif		
2	18	001	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawalan yang disusun administrasinya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Dokumen 0 Orang	0	0	0	0			DAU				Aparatur	Aparatur	1 Dokumen 4 Orang	24.199.900	DPMPTSP			
2	18	001	2.05	005	Monitoring,Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen							DAU						1 Dokumen	4.199.900	DPMPITSP			
2	18	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/seminar/diklat	3 Orang	3 Orang	3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0	0	0			DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	4 Orang	20.000.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Paket 2 Paket 5 Dokumen 12 Laporan	116.040.500	100.729.000	100.729.000	100.729.000			DAU				Aparatur	Aparatur	2 Paket 2 Paket 5 Dokumen 12 Laporan	136.068.000	DPMPTSP			
2	18	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.798.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	2 Paket	2.054.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.06	002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.282.500	20.205.000	20.205.000	20.205.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	2 Paket	22.905.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.06	003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	5 SKHU	5 SKHU	5 SKHU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	5 Dokumen	4.860.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.06	004	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	12 kali	12 kali	12 kali	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.796.000	5.076.000	5.076.000	5.076.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	5.316.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.06	005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	29 kali	29 kali	29 kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.304.000	68.554.000	68.554.000	68.554.000	Lambar dan luar, Kab. Lampung Barat	Lambar dan luar, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	100.933.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan daerah yang telah diadakan	1 unit	1 unit	1 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			DAU				Aparatur	Aparatur	5 Unit	37.700.000	DPMPTSP			
2	18	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	1 unit	1 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	5 Unit	37.700.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	178.536.600	156.754.500	156.754.500	156.754.500			DAU				Aparatur	Aparatur	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	159.195.000	DPMPTSP			
2	18	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan Surat Keluar	1127 Surat	1127 Surat	1127 Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.757.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	1.625.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.740.000	16.340.000	16.340.000	16.340.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	22.560.000	DPMPITSP			
2	18	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	158.039.600	139.029.500	139.029.500	139.029.500	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	12 Laporan	135.010.000	DPMPITSP			

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020			Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Detail Perubahan Dibanding APBD Murni
						Target 2022						Pagu Indikatif Tahun 2022				Lokasi		Prioritas						Target	Pagu Indikatif		
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit 8 Unit 1 Gedung	131.936.000	132.368.000	132.368.000	132.368.000			DAU				Aparatur	Aparatur	11 Unit 13 Unit 1 Gedung	149.875.000	DPMP/TSP	
2	18	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang disediakan pajak kendaraannya	11 kendaraan	11 kendaraan	11 kendaraan		0	0	-	0	-	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU		Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	0		DPMP/TSP		
2	18	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaannya	11 kendaraan	11 kendaraan	11 kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	104.340.000	120.340.000	120.340.000	120.340.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU		Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Aparatur	Aparatur	11 Unit	106.860.000	DPMP/TSP		
2	18	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	12.044.000	10.497.000	10.497.000	10.497.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	Aparatur	13 Unit	10.237.000	DPMP/TSP		
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	15.552.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU			Aparatur	Aparatur	1 Gedung	32.778.000	DPMP/TSP		
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0%							DAU			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	20%	300.000.000	DPMP/TSP		
2	18	002	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen							DAU			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	1 Dokumen	300.000.000	DPMP/TSP		
2	18	002	2.01	001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen							DAU			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	1 Dokumen	300.000.000	DPMP/TSP		
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	50 Unit Usaha	1.727.550.500	996.036.600	755.200.600	755.200.600			DAU			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	10%	1.550.000.000	DPMP/TSP		
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2 Kali	2 Kali	1 Kali	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.727.550.500	996.036.600	755.200.600	755.200.600			DAU			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	2 Dokumen	1.550.000.000	DPMP/TSP		
2	18	003	2.01	001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	30.000.000	-	0	-			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	0	-	DPMP/TSP		
2	18	003	2.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Kali	2 Kali	1 Kali	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.697.550.500	996.036.600	755.200.600	755.200.600			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	2 Dokumen	1.550.000.000	DPMP/TSP	Surat Gubernur Lampung Nomor : 045.2/0860/04/2022, Tanggal 07 Maret 2022 Perihal Peniadaan Penyelenggaraan Pekan Raya Lampung Tahun 2022	
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan	90%	90%	90%	Meningkatnya kualitas pelayanan	90%	355.399.000	221.715.000	221.715.000	221.715.000			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat	Masyarakat	100%	586.625.000	DPMP/TSP		
2	18	004	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit	400 izin	400 izin	400 izin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengadaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Berbasis dan Non Berbasis	400 pelaku usaha 60 kegiatan usaha 20 orang	355.399.000	221.715.000	221.715.000	221.715.000			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat	Masyarakat	400 pelaku usaha 60 kegiatan usaha 20 orang	586.625.000	DPMP/TSP		

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Indikator dan Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022								Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Detail Perubahan Dibanding APBD Murni
						Target 2022				Pagu Indikatif Tahun 2022				Lokasi		Prioritas				Target	Pagu Indikatif						
2	18	004	2.01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan yang dilayani	400 Orang	400 Orang	400 Orang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400 pelaku usaha	203.259.000	126.497.000	126.497.000	126.497.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat	Masyarakat	400 pelaku usaha	487.090.000	DPMP/TS		
2	18	004	2.01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah survei perizinan	70 Survei Perizinan	70 Survei Perizinan	70 Survei Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Aspek Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	70 kegiatan usaha	70.594.000	59.040.000	59.040.000	59.040.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat	Masyarakat	60 kegiatan usaha	73.585.000	DPMP/TS		
2	18	004	2.01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15 orang	81.546.000	36.178.000	36.178.000	36.178.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat	Masyarakat	20 orang	25.950.000	DPMP/TS		
				Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis																			
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi	75%	75%	75%	Meningkatnya Realisasi Investasi	75%	326.122.000	345.997.000	345.997.000	345.997.000			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	75%	326.122.000	DPMP/TS		
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	7 Jenis	326.122.000	345.997.000	345.997.000	345.997.000			DAK-NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	8 Kegiatan Usaha 210 Pelaku Usaha 13 Kegiatan Usaha	326.122.000	DPMP/TS	Surat Kementerian Investasi No : 675/A.3/B.1/2021 Tanggal 30 November 2021 Perihal Penyampaian Pedoman sementara DAK Non fisik Fasilitas Penanaman Modal TA. 2022	
2	18	005	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	6 kali/Laporan	6 kali/Laporan	7 kali/Laporan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha	48.300.000	48.300.000	97.260.000	97.260.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAK-NON FISIK			Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	8 Kegiatan Usaha	48.114.000	DPMP/TS		
2	18	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan (Bimtek) Penanaman Modal	180 orang	180 orang	126 orang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	181.222.000	216.822.000	206.137.000	206.137.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAK-NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	210 Pelaku Usaha	216.878.000	DPMP/TS		
				Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan (Sosialisasi) Penanaman Modal		90 orang	90 orang	84 orang	DPMP/TS																		
2	18	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	20 kali	20 kali	13 kali	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	96.600.000	80.875.000	42.600.000	42.600.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAK-NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	13 Kegiatan Usaha	61.130.000	DPMP/TS		
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	15 Sektor Usaha	40.012.002	34.000.000	34.000.000	34.000.000			DAU			Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	100%	70.000.000	DPMP/TS		
2	18	006	2.01		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	40.012.002	34.000.000	34.000.000	34.000.000			DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	1 Dokumen	70.000.000	DPMP/TS		
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Buku data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Target : 1 Dokumen)	1 Dokumen	40.012.002	34.000.000	34.000.000	34.000.000	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia	Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	Investor dan Calon Investor PMDN/PMA	1 Dokumen	70.000.000	DPMP/TS		
TOTAL												5.666.712.806	4.532.443.500	4.291.607.500	4.291.607.500												